

Judul : Menilik proyek-proyek strategis penunda senja kala migas
Tanggal : Jumat, 12 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 19

MENILIK PROYEK-PROYEK STRATEGIS PENUNDA SENJA KALA MIGAS

ADITYA PUTRA PERDANA

Ada empat proyek strategis nasional hulu migas yang diharapkan dapat memacu produksi saat beroperasi kelak. Pertama adalah proyek pengembangan lapangan gas Jamburan Tiung Biru di Jawa Timur. Proyek ini resmi beroperasi sejak 2022, tetapi saat ini belum berproduksi dalam kapasitas penuh.

Kedua ialah proyek gas alam cair (LNG) Tangguh Train 3 di Papua Barat. Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), proyek dalam proses *decommissioning*. Setelah itu, LNG Tangguh Train 3 yang dioperasikan BP diharapkan segera beroperasi (*on stream*) pada tahun ini.

Proyek strategis berikutnya ialah Indonesia Deepwater Development (IDD) di laut lepas Kalimantan Timur. Saat ini, proyek tersebut dalam proses pengalihan hak partisipasi (PI) sebesar 63 persen dari Chevron ke ENI asal Italia. IDD yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Selanjutnya ialah proyek Abadi Masela di laut lepas Maluku. Setelah Shell, pemegang saham 35 persen, memutuskan mundur pada 2020, PT Pertamina (Persero) kini tengah dalam proses menggantikannya. Blok yang menyimpan cadangan gas triliunan kaki kubik tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2029.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, *sales and purchase agreement* pada proyek IDD ditandatangani dalam waktu dekat. Sementara pada Masela, diharapkan sudah ada *submission offering* dari Pertamina. Mudah-mudahan suk-

ses dan kami juga terus berkomunikasi dengan Shell," kata Dwi, beberapa waktu lalu.

Pemerintah, melalui SKK Migas, memang sudah menanti-nanti kemajuan dari berbagai proyek strategis tersebut. Sebab, selama ini terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan mundur. Itu termasuk masa pengoperasian kapasitas penuh lapangan Jamburan Tiung Biru, dari semula ditargetkan Maret 2023 mundur ke Mei 2023.

Bagaimanapun, industri migas Indonesia kini berpacu dengan waktu dalam memanfaatkan daya alam itu sebelum kelak beralih ke era energi terbarukan. Apalagi, ada target besar yang diplot SKK Migas, yang juga menjadi target nasional, yakni produksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030.

Hingga triwulan I-2023, produksi siap jual (*lifting*) minyak baru 613.700 barel per hari, sedangkan sulfur gas mencapai 5,4 miliar standar kaki kubik per hari. Tantangan ke depan terbilang berat karena dua hal yang harus diatasi, yakni penurunan produksi secara alamiah akibat semakin tuanya usia sumur migas serta bagaimana membuat sumur-sumur yang ada tersebut produksinya dapat meningkat.

Pengamat migas yang juga dosen Teknik Perminyakan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Topan Herianto, Minggu (23/4/2023), berpendapat, investasi dari luar negeri masih diperlukan dalam mengoptimalkan cadangan migas di Indonesia. Dalam hal ini, daya tarik bagi calon investor amatlah krusial.

"Bagi mereka (investor asing), yang utama adalah keekonomian. Jika dipaksa-paksa tetapi tidak layak, akan mengulur kegiatan dan mereka bisa mundur. Apabila potensi-potensi pada proyek strategis nasional dijalankan, disertai dengan masifnya eksplorasi, produksi (migas) bisa naik," kata Topan.

Segala hal terkait pengembangan lapangan migas juga seharusnya dilepaskan dari segala unsur politik. Adapun pengembangan Blok Masela, menurut Topan, akan bisa optimal jika dilakukan dengan fasilitas pemrosesan di laut, bukan di darat. Lewat rencana pengembangan lapangan (POD) baru, Masela berpotensi diandalkan sebagai penghasil gas utama.

Perbaikan regulasi
Topan menambahkan, kepastian regulasi memegang peran penting dalam optimalisasi potensi cadangan migas di Indonesia. Bagaimanapun, yang dibutuhkan investor ialah kepastian. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang belasan tahun terkatung-katung, mesti dituntaskan.

Dosen Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengaku tak habis pikir dengan kenyataan sudah ada lapangan migas yang telah terbukti besar, tetapi tak bisa dijalankan. Yang terjadi justru pelaksanaan mundur, bahkan perusahaan yang berinvestasi henggang.

Oleh karena itu, menurut Pri Agung, senja kala migas mungkin terjadi jika pengembangan hulu migas berjalan dengan cara-cara biasa (*business as usual*). Yang perlu diupayakan kini ialah menaikkan produksi di lapangan migas yang telah terbukti serta pengeboran eksplorasi masif guna menemukan cadangan-cadangan besar baru.

Ia pun berpendapat revisi UU No 22/2001 sudah sangat genting untuk direalisasikan.

Perbaikan regulasi penting karena menyangkut tiga aspek yang saling terkait, yaitu kepastian hukum, kepastian fiskal

dan keekonomian, serta kemudahan birokrasi/perizinan.

"Yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya *sunset* industri migas adalah mengoptimalkan lapangan migas yang sudah terbukti dan menemukan lapangan besar migas (baru). Agar berjalan, tidak bisa dengan cara-cara biasa dan revisi UU No 22/2001 diharapkan bisa mengakomodasi permasalahan yang ada saat ini," ucap Pri Agung.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadi juga mengatakan, revisi UU tentang Minyak dan Gas Bumi amat mendesak. Lantaran merupakan inisiatif DPR, ia menyebutkan pihaknya kini tinggal menunggu panggilan Komisi VII DPR (yang membidangi sektor energi) untuk bisa segera memulai prosesnya.

Sejumlah anggota DPR juga menyatakan pentingnya pengesahan revisi UU tersebut. Rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah asosiasi migas pun telah digelar oleh Komisi VII,

Sisi selatan Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan

Tanimbar, Maluku, pada April 2019. Menurut rencana, daerah itu menjadi lokasi untuk industri pengolahan gas Blok Masela.

beberapa waktu lalu. Rapat tersebut untuk menerima masukan terkait perubahan-perubahan dalam UU No 22/2001.

Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, Komisi VII masih terus menerima masukan-masukan dari organisasi, mitra, dan akademisi, untuk kemudian diperdebatkan di tahap panitia kerja. Baru setelah itu akan diajukan menjadi usulan atau inisiatif DPR.

Ironi kala dunia membutuhkan gas bumi sebagai energi fosil pen jembatan dalam transisi energi, Indonesia belum juga bisa mengoptimalkannya. Apabila belum ada lompatan serius fosil pen jembatan dalam transisi energi, potensi besar gas bumi di Tanah Air selamanya tetap terkubur di dalam perut bumi.